

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalam kabupaten/kota penghitung Indek Harga Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkan pada hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan bahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan setiap hari. Terdapat 5 (lima) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-masing :

1. Pasar Niaga Bersujud di kecamatan Simpang Empat
2. Pasar Raya Bumi Pangeran di Kecamatan Kusan Hilir
3. Pasar Nusa Indah Kecamatan Angsana
4. Pasar Sudan Raya Kecamatan Satui
5. Pasar Batulicin Kecamatan Batulicin

Pemantauan perkembangan harga terbatas pada komoditas barang dan produk tertentu sementara jasa dan pelayan serta komoditas yang harganya ditetapkan pemerintah tidak menjadi bagian yang dilakukan pemantauan. Secara umum perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan III tahun 2022 terdapat komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga cukup signifikan. Komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya Minyak Goreng, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, bawang merah dan Beras Lokal dari jenis Unus Mutiara, Siam Unus, Karang Dukuh dan Sihirang, sementara untuk beras kemasan (premium) cenderung stabil. Sedangkan penurunan Harga terjadi pada komoditas cabe-cabean baik Cabe Merah Besar, Cabe Merah Kriting Dan Juga Cabe Rawit (Rawit Local, Rawit Hijau, Rawit Taji Dan Rawit Tiung).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Penyebab utama inflasi ialah dampak dari naiknya harga BBM, ketersediaan energi dan kenaikan harga pangan. Penghitungan laju inflasi pada Triwulan III Tahun 2022 relatif tinggi disebabkan oleh masih tingginya harga energi dan pangan global sehingga harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Perubahan harga kebutuhan pokok dan penting terjadi pada hampir semua komoditi meskipun beberapa komoditi juga mengalami penurunan harga.

Beberapa permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi diantaranya :

1. Pada tahap awal tidak cukup data dan informasi yang tersedia pada rantai pasok bagian mana perubahan dan kenaikan harga terjadi.
2. Hampir semua jenis komoditi mengalami perubahan kenaikan harga, hanya beberapa komoditi saja yang dapat dilakukan intervensi.
3. Intervensi dan upaya pengendalian inflasi tidak dilakukan secara berkelanjutan, perubahan penurunan harga hanya bersifat sementara.
4. Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan melalui kegiatan penanaman dan produksi khususnya tanaman pangan dan hortikultura diperlukan cukup waktu sehingga tidak dapat mengatasi kebutuhan dalam jangka pendek.
5. Produksi beberapa kebutuhan bahan pokok dan penting di dalam daerah terbatas sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan bersama anggota TPID diantaranya Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Gudang BULOG Batulicin serta mitra kerja Pemerintah dan Badan Usaha diantaranya Para Distributor kebutuhan pokok, pelaku usaha mikro dan kecil, pelaku usaha industri kecil dan Lembaga Sosial Masyarakat.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu juga telah mengupayakan fasilitasi akses keuangan daerah dengan mendorong Lembaga keuangan dan perbankan untuk percepatan dan kemudahan penyaluran kredit terutama untuk usaha mikro dan menengah. Meski demikian hal ini belum menunjukkan hasil optimal mengingat daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban ke Lembaga keuangan dan perbankan juga mengalami penurunan.

Kebijakan lain yang menjadi program unggulan kabupaten Tanah Bumbu adalah Pengadaan Mobil Operasional Ketahanan Pangan Desa. Mobil operasional jenis pick up tersebut diperuntukan bagi semua desa di kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah sebanyak 142 Unit. Melalui kebijakan tersebut diharapkan para produsen komoditas pertanian, peternakan dan perikanan mendapatkan fasilitas untuk pengangkutan dari mulai pembibitan, pemeliharaan dan pemupukan serta pengangkutan hasil produksi. Dengan hal tersebut dapat menjamin pada kelancaran distribusi dan kualitas produk yang terjaga. Pada akhirnya diharapkan harga kebutuhan pokok dapat terjangkau dengan tetap memberikan keuntungan yang wajar pada produsen.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dampak dari Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM tidak dapat terukur efektivitasnya
2. Upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan seperti kegiatan Pasar Murah belum sistematis berdampak luas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pengendalian inflasi di kabupaten/kota perlu dilaksanakan secara terpadu dan tidak parsial, dengan lebih mendorong dan memperkuat tugas-tugas TPID kabupaten/kota yang disertai anggaran yang memadai.
2. Perlu melakukan identifikasi rantai pasok kebutuhan bahan pokok dan penting yang terbatas atau tidak dapat dipenuhi oleh daerah, dan ditindaklanjuti dengan Kerjasama dengan daerah penghasil, baik Kerjasama antar daerah maupun Kerjasama antar pelaku usaha.